



LAPORAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SATKER BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, pemerintahan yang kapabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui Perpres tersebut, setiap instansi pemerintah, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diwajibkan untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sebagai bagian dari SAKIP, setiap instansi pemerintah, termasuk BPK, wajib untuk menyusun Laporan Kinerja. Pelaporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja tidak hanya melekat pada BPK sebagai lembaga, tapi juga wajib disusun oleh kepala satuan kerja yang ada di BPK termasuk Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dituntut untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja organisasinya. Salah satu upaya strategis untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas adalah melalui pengukuran dan evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja (Satker).

Laporan ini merupakan hasil analisis kebijakan internal yang menelaah capaian kinerja Satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun Anggaran 2024, berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), target output, serta program kerja prioritas. Selain itu, laporan ini juga merumuskan implikasi kebijakan serta rekomendasi peningkatan efektivitas manajemen kinerja Satker ke depan.

B. DASAR HUKUM

Berikut ini adalah dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Analisis Kebijakan terhadap Capaian Kinerja Satker BPK Kaltara Tahun 2024:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPK.
- f. Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- g. Renstra BPK 2020-2024 sebagai dokumen strategis nasional.

C. METODOLOGI ANALISIS

Metodologi Telaah dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Satke BPK Kaltara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Data Kuantitatif: IKU, output kegiatan, realisasi anggaran, target perjanjian kinerja.
- b. Data Kualitatif: Hasil monitoring evaluasi internal, laporan review, dan wawancara dengan unit teknis;
- c. Pendekatan Analisis:
 - 1) Analisis GAP antara target dan realisasi kinerja.
 - 2) Analisis SWOT atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satker.
 - 3) Kajian kebijakan internal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja.

D. KONDISI DAN CAPAIAN KINERJA SATKER BPK KALTARA TAHUN 2024

Pengelolaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA KINERJA meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara bersama Direktorat PSMK melakukan pengukuran secara bertahap dari mulai proses monitoring, evaluasi, hingga pelaporan. Pada Tahun 2024, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 101,29. Skor tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 1,91 Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut. (Skor capaian kinerja menyajikan target kinerja dan capaian kinerja Tahun 2022 s.d 2024).



Gambar 1. Perbandingan Skor Kinerja BPK Kaltara Tahun 2022 s.d 2024

Berdasarkan Gambar 1. Perbandingan Skor Kinerja BPK Kaltara Tahun 2022 s.d 2024, realisasi capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 mendapatkan skor kinerja sebesar 101,29 dengan target 2024 sebesar 100,00% atau dengan kategori Sangat Baik untuk kinerja organisasi. Realisasi kinerja organisasi pada Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 99,38 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 99,52. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya Penguatan Tata Kelola Organisasi, Perencanaan Strategis yang Efektif, Peningkatan Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi, Fokus pada Kualitas Hasil Pemeriksaan, Efektivitas Sistem Pengendalian dan Pengawasan, Pengelolaan Sumber Daya yang Optimal berupa efisiensi anggaran, serta Peningkatan Kepercayaan Publik pada BPK Perwakilan Kaltara.

Berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan IV Tahun 2024:

Tabel 1. Pencapaian Indikator Kinerja BPK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	96,00%	96
	1.1	Hasil QA dan QC Satker (Bobot 40%)		100%	
	1.2	Hasil Evaluasi EPP (Bobot 60%)		93,33%	

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100%	100
	2.1	Jumlah LHP yang Simpulannya sesuai dengan harapan penugasan		6	
	2.2	Jumlah LHP yang diterbitkan		6	
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	86,15%	105
	3.1	Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti		4.420	
	3.2	Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses		710	
	3.3	Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti		7	
	3.4	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		40	
	3.5	Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee		5.177	
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,51%	100,51
	4.1	Realisasi pemeriksaan tematik nasional		3	
	4.2	Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional		3	
	4.3	Alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan		0,51	
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
	5.1	Jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK	6		
	5.2	Seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa	6		
	5.3	Alokasi skor untuk pemeriksa yang terlibat			
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	101,19%	101,19
	6.1	Realisasi pemeriksaan tematik lokal	3		
	6.2	Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal	3		
	6.3	Alokasi skor untuk pemeriksa yang terlibat	1,19		
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	4,82	100,21
	8	Hasil Evaluasi AKIP	90,05 (AA)	91,40 (AA)	101,50
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,00%	97,89%	99,88
	9.1	Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi SISDM (Bobot 20%)	100,00%		
	9.2	Tingkat pemanfaatan Layanan Aplikasi JASMIN (Bobot 15%)	99,80%		
	9.3	Tingkat pemanfaatan Layanan Aplikasi Pemeriksaan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) (Bobot 20%)	100,00%		
	9.4	Tingkat pemanfaatan layanan Aplikasi SiAP (20%)	91,66%		

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	9.5 Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi SiPTL (Bobot 25%)		98,34%	
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	110,00%	105
	10.1 Tingkat Penyusunan <i>Innovative Practice</i> (Bobot 50%)		100,00%	
	10.2 Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (Bobot 50%)		120,00%	
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,00	105
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100
	12.1 Jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat		65	
	12.2 Jumlah seluruh pegawai		65	
	13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	91,40%	105
	13.1 Nilai EKA Perencanaan		85,00%	
	13.2 Nilai EKA Pelaksanaan		97,80%	
SKOR KINERJA				101,29

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan IV Tahun 2024 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar **101,29**. Secara keseluruhan, pencapaian skor kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:
 - a. IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; dan
 - b. IKU 9 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
2. Terdapat delapan Indikator Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:
 - a. IKU 3 tentang Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;

- b. IKU 4 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
 - c. IKU 6 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
 - d. IKU 7 tentang Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
 - e. IKU 8 tentang Hasil Evaluasi AKIP;
 - f. IKU 10 tentang Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
 - g. IKU 11 tentang Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; dan
 - h. IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran
3. Terdapat tiga Indikator Kinerja mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:
- a. IKU 2 tentang Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
 - b. IKU 5 tentang Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan; dan
 - c. IKU 12 tentang Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;

I. ANALISIS HASIL EVALUASI AKIP

Analisis Indikator ini menunjukkan pengukuran atau evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. Tujuan dari dilakukannya pengukuran indikator ini adalah untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Pengukuran indikator ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah dijelaskan pada Sub bab Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024.

Sesuai dengan informasi dari Inspektorat Utama dan Direktorat PSMK, hasil evaluasi dari Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Kalimantan Utara pada Triwulan IV Tahun 2024 mendapatkan nilai 91,40 penilaian evaluasi AKIP oleh Tim Evaluator dan Reviu.

Realisasi IKU 8 pada Triwulan IV Tahun 2024 mendapatkan realisasi 91,40 (AA) dengan target sebesar 90,05 (AA) mendapatkan skor kinerja sebesar 101,50. Pencapaian kinerja Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target IKU selama Tahun 2024 adalah membangun budaya organisasi berorientasi pada akuntabilitas, meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan melengkapi semua sub komponen pada LAKIN, membuat matriks monitoring setiap komponen Evaluasi AKIP berupa pengukuran kinerja, perencanaan kinerja,

pelaporan kinerja, membuat matriks perhitungan dan perbandingan tindak lanjut dari rekomendasi ITAMA terkait hasil evaluasi kinerja.

Kendala atau kelemahan yang dihadapi untuk mempertahankan serta meningkatkan target pada indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan manajemen kinerja yang masih berorientasi pada *output* dari pada *outcome*;
2. Kualitas perencanaan kinerja yang belum menggambarkan alur logika program dan kinerja yang logis yang dapat terukur dan tercapai oleh satuan kerja;
3. Penetapan kinerja baik kinerja utama maupun kinerja sasaran atau kinerja program yang belum berorientasi hasil (*outcome*);
4. Belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan serta dibahas dalam LAKIN;
5. Belum dimanfaatkan LAKIN dan evaluasi AKIP dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.

Upaya dan langkah perbaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan capaian kinerja atas IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP yaitu sebagai berikut:

1. Membangun budaya organisasi berorientasi pada akuntabilitas;
2. Revisi dokumen perencanaan baik rencana strategis, rencana kinerja, serta penetapan kinerja melalui perumusan sasaran yang spesifik (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achivable*), berorientansi hasil (*Result Oriented*), yang dapat dicapai dalam periode atau satuan waktu tertentu (*time-bond*) atau dikenal dengan istilah SMART;
3. Perumusan kembali indikator kinerja utama yang belum berorientasi hasil (*outcome*);
4. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja internal AKIP pada manajemen kinerja;
5. Pemanfaatan informasi kinerja dalam manajemen kinerja AKIP pada pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 8 Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
Realisasi	A (88,59)	A (89,58)	A (89,82)	A (87,10)	AA (91,40)
Capaian Realisasi	103,01	104,16	102,07	97,87	101,50
Persentase Realisasi Tahun Berjalan terhadap Target Tahun 2024	98.38%	99.48%	99.74%	96.72%	101,50%

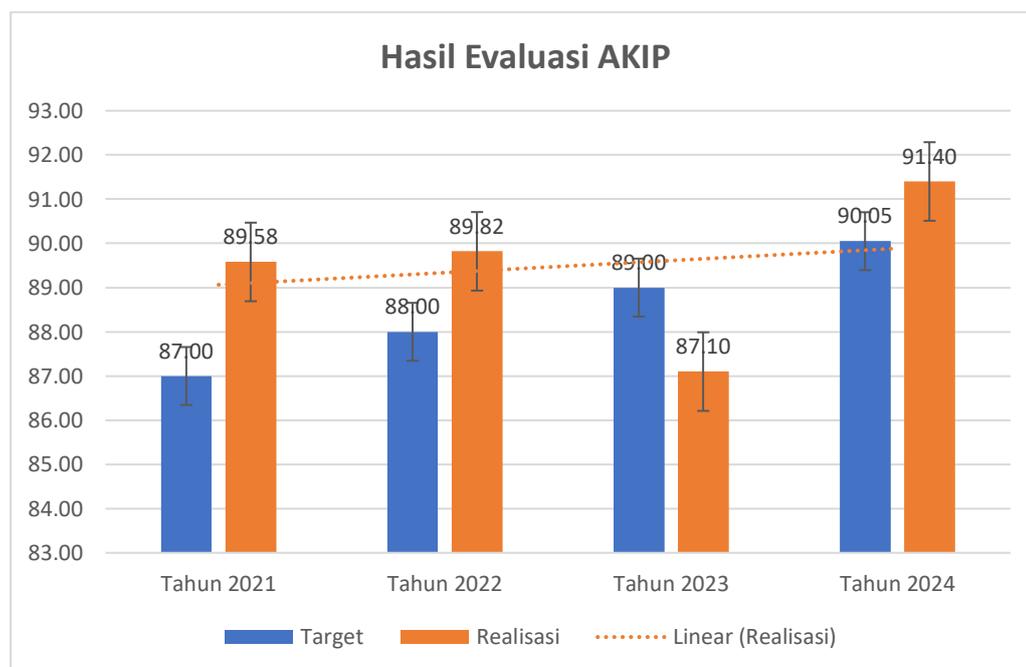
Berdasarkan tabel tersebut, realisasi capaian kinerja IKU ini sebesar 91,40 (AA) dengan target Tahun 2024 sebesar 90,05 (AA). Sehingga mendapatkan skor kinerja 101,50%. Terdapat peningkatan sebesar 4,3% dari realisasi Tahun 2023. Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk meningkatkan capaian target setiap tahunnya dengan terus memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Itama.

Berikut perbandingan realisasi IKU 8 Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (91,40)	101,50

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian IKU 8 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah memenuhi target Renstra Tahun 2024 serta sudah mencapai target Renstra Tahun 2020 sampai dengan 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk melakukan perbaikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk tahun selanjutnya, dengan memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan sehingga tersaji informasi yang informatif dan relevan. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan capaian tiga tahun terakhir jika disajikan dalam bentuk grafik dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

II. CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN PRIORITAS

1. Pemeriksaan LKPD Tahun 2023 (diserahkan 2024): seluruh entitas diselesaikan tepat waktu dengan opini sesuai kondisi riil entitas.
2. Pemeriksaan Kinerja dan DTT: 4 penugasan strategis telah dilakukan, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan.
3. Penguatan Sinergi Kelembagaan: dilaksanakan audiensi dan MOU dengan 5 pemda serta IPH.

III. ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 616 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Pada Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memperoleh pagu anggaran sebesar Rp18.894.486.000,00. Anggaran ini terbagi ke dalam anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sejumlah Rp6.714.489.000,00 dan anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sejumlah Rp12.179.997.000,00. Realisasi Anggaran pada Tahun 2024 terdapat blokir anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp105.113.000 Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 Perihal Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Nota Dinas Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 1398/ND/X/11/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Tindak Lanjut Kebijakan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Satker TA 2024.

Realisasi Anggaran pada RKP menunjukkan bahwa realisasi anggaran 99.85% dari pagu anggaran dan realisasi RKSP menunjukkan bahwa realisasi anggaran dengan persentase 99.84% dari pagu anggaran. Berikut tabel anggaran dan realisasi RKP dan RKSP pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi RKP Tahun 2024

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	1043.FAF.U41	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	5.132.279.000	12 LHP	5.124.208.012	99.84%
	A.	LHP Keuangan	2.680.242.000	6 LHP	2.680.240.560	100.00%
	B.	LHP Kinerja	1.467.726.000	4 LHP	1.463.211.830	99.69%
	C.	LHP DTT	984.311.000	2 LHP	980.755.622	99.64%
2	1043.FAF.051	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	133.866.000	63 LHP	133.865.144	100.00%
3	1043.FAF.116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	98.064.000	12 Laporan	97.210.000	99.13%

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4	1043.FAF.124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	146.608.000	12 Laporan	146.601.100	100.00%
5	1043.FAF.083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1.960.000	1 Rumusan	1.924.000	98.16%
6	1043.FAF.174	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	1.073.233.000	12 Laporan	1.072.360.489	99.92%
	A.	<i>Melaksanakan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan</i>	7.460.000		7.090.000	95.04%
	B.	<i>Melaksanakan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan</i>	992.825.000		992.322.804	99.95%
	C.	<i>Melaksanakan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</i>	65.763.000		65.762.685	100.00%
	D.	<i>Melaksanakan Reviu atas Hasil Pemeriksaan</i>	7.185.000		7.185.000	100.00%
7	1043.FAF.091	Sumbangan IHPS Perwakilan	125.148.000	2 Laporan Sumbangan IHPS	125.147.243	100.00%
8	1043.FAF.099	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3.331.000	6 Laporan	3.266.730	98.07%
Jumlah (1 s.d. 8)			6.714.489.000	120	6.704.582.718	99.85%

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi RKSP Tahun 2024

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	1043.FAF.175	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.882.506.000	21 Laporan	1.876.881.855	99.70%
	051.	<i>Melaksanakan Layanan Tata Usaha</i>	145.338.000		145.337.845	100.00%
	052.	<i>Melaksanakan Layanan Kehumasan</i>	310.492.000		308.456.083	99.34%
	053.	<i>Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia</i>	259.692.000		258.888.061	99.69%
	054.	<i>Melaksanakan Layanan Keuangan</i>	363.225.000		362.476.999	99.79%
	055.	<i>Melaksanakan Layanan Umum dan TI</i>	430.559.000		430.274.154	99.93%
	056.	<i>Melaksanakan Layanan Hukum</i>	214.840.000		213.894.375	99.56%
	057.	<i>Melaksanakan Dukungan</i>	40.304.000		39.884.100	98.96%

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		<i>Pembinaan Pimpinan BPK</i>				
	058.	<i>Melaksanakan Manajemen Internal Perwakilan</i>	118.056.000		117.670.238	99.67%
2	1043.EBA.994	Layanan Perkantoran	9.444.172.000	1 Layanan	9.436.709.299	99.92%
	EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	4.338.834.000		4.334.391.214	99.90%
	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.105.338.000		5.102.318.085	99.94%
	A.	<i>Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan</i>	755.782.000		754.628.116	99.85%
	B.	<i>Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan</i>	38.400.000		38.400.000	100.00%
	C.	<i>Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia</i>	197.612.000		197.517.594	99.95%
	D.	<i>Layanan Perkantoran Bidang Keuangan</i>	105.120.000		105.120.000	100.00%
	E.	<i>Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI</i>	3.742.182.000		3.741.377.194	99.98%
	F.	<i>Layanan Dukungan Kesekretariatan Perwakilan</i>	266.242.000		265.275.181	99.64%
3	CI.1043.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	853.319.000	30 Paket	846.896.232	99.25%
	EBB.951.052	Layanan Sarana Internal	497.854.000	28 Unit	493.277.232	99.08%
	EBB.971.051	Layanan Prasarana Internal	355.465.000	2 Paket	353.619.000	99.48%
		Jumlah (1 s.d. 3)	12.179.997.000	52	12.160.487.386	99.84%

E. ANALISIS PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

1. Permasalahan Internal

a. Ketimpangan Kapasitas SDM:

Beberapa penugasan dilakukan oleh tim dengan pengalaman terbatas, berpengaruh terhadap efektivitas mutu.

b. Pengelolaan Jadwal Pemeriksaan:

Waktu antara penyelesaian pemeriksaan dan penyerahan laporan cukup sempit, menyulitkan review mutu yang optimal.

c. Pemanfaatan Aplikasi Kinerja:

Belum semua unit menggunakan dashboard PRISMA-KINERJA secara maksimal.

2. Tantangan Eksternal

- a. Kompleksitas Entitas Pemeriksaan:
Beberapa pemda mengalami keterlambatan penyampaian LKPD dan data pendukung.
- b. Tingginya Ekspektasi Stakeholder:
Kebutuhan akan informasi berkualitas tinggi secara cepat memerlukan penguatan strategi komunikasi hasil pemeriksaan

F. ANALISIS KEBIJAKAN

1. Efektivitas Kebijakan Kinerja Saat Ini
 - a. Kebijakan perencanaan dan monitoring kinerja berbasis IKU telah terimplementasi cukup baik.
 - b. Mekanisme reviu dan pembinaan telah ada namun belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika beban kerja.
 - c. Belum terdapat sistem insentif internal yang spesifik untuk reward atas pencapaian tinggi.
2. Dampak Kebijakan terhadap Kinerja
 - a. Kebijakan pelatihan dan penguatan kapasitas SDM cukup mendukung kinerja pemeriksa, namun masih bersifat umum.
 - b. Ketersediaan SOP dan pedoman teknis mendukung pencapaian output, namun belum spesifik untuk pemeriksaan tematik daerah.

G. IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI

1. Implikasi Kebijakan

- a. Perlu penguatan sistem reward dan feedback kinerja berbasis IKU untuk mendorong motivasi tim.
- b. Kebijakan internal perlu lebih adaptif terhadap tantangan spesifik daerah seperti keterbatasan data, geografis, dan dinamika entitas.

2. Rekomendasi Strategis

Tabel 6. Rekomendasi dan Target Implementasi Kebijakan

No	Rekomendasi	Target Implementasi
1	Optimalisasi sistem pengawasan kinerja harian via dashboard PRISMA-KINERJA	Optimalisasi sistem pengawasan kinerja harian via dashboard e-Kinerja
2	Penguatan pelatihan tematik untuk auditor terkait isu lokal sectoral dan Tematik Nasional	Penguatan pelatihan tematik untuk auditor terkait isu lokal sektoral
3	Penguatan peran setiap Subbagian pada Kesekretariatan dalam reviu internal per triwulan	Penguatan peran Pengelola Kinerja dalam reviu internal per triwulan

No	Rekomendasi	Target Implementasi
4	Penyusunan kebijakan internal penghargaan berbasis IKU	Penyusunan kebijakan internal penghargaan berbasis IKU

H. PENUTUP

Capaian kinerja Satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan on track, dengan sebagian indikator bahkan telah melampaui target. Namun demikian, tantangan struktural dan dinamika eksternal perlu diantisipasi melalui penguatan kebijakan internal, baik dalam bentuk pelatihan, sistem reward, maupun optimalisasi pengendalian mutu dan monitoring berbasis data.

Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2024 memperoleh pencapaian skor kinerja sebesar **101,29**. Realisasi capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian 101,29 mengalami peningkatan sebesar 1,91 jika dibandingkan tahun 2023 dengan skor kinerja sebesar 99,38. Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian indikator kinerja, antara lain:

1. IKU 2 tentang Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
2. IKU 3 tentang Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
3. IKU 4 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
4. IKU 5 tentang Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan; dan
5. IKU 6 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
6. IKU 7 tentang Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
7. IKU 8 tentang Hasil Evaluasi AKIP;
8. IKU 10 tentang Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
9. IKU 11 tentang Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
10. IKU 12 tentang Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
11. IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran.

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target adalah IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, dan IKU 9 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut adalah Hasil Evaluasi Akurasi dan Konsistensi atas LHP yang dimuat dalam IHPS 1 Tahun 2024 pada Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penyusunan IHPS 1 Tahun 2024 oleh Direktorat EPP atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan nilai

93,33%. Bila dirinci lebih lanjut, perhitungan nilai tersebut disebabkan oleh penilaian tingkat konsistensi atas LHP yang mendapatkan nilai 83,33% dengan rincian konsistensi jumlah LHP sebanyak 1 dari 6 LHP dan terdapat 3 jumlah kasus pada konsistensi, serta kurangnya monitoring data pemanfaatan teknologi informasi pada Aplikasi *Big Data Analytics* BPK RI pada periode bulanan dan Triwulan Tahun 2024.

Dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebanyak delapan IKU telah melebihi target yang ditentukan, sebanyak tiga IKU telah sesuai dengan target dan dua IKU belum mencapai target pada Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian dari tahun ke tahun dengan menerapkan rencana aksi yang telah disusun. Untuk Indikator Kinerja yang belum mencapai target, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melakukan upaya-upaya perbaikan dengan memanfaatkan evaluasi Tahun ini untuk perbaikan pada periode Renstra yang selanjutnya.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja yang sudah sesuai dan yang telah melampaui target yang ditetapkan. Agar dapat meningkatkan pencapaian target kinerja yang belum tercapai, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada periode Renstra Tahun selanjutnya akan meningkatkan kualitas mutu hasil pemeriksaan, meningkatkan pengendalian mutu (*Quality Control*) dan pemerolehan keyakinan mutu (*Quality Assurance*) atas setiap Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan, memperbaiki tingkat konsistensi dan akurasi LHP yang diterbitkan, melaksanakan sosialisasi terkait teknologi informasi yang memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas penggunaan teknologi informasi dengan *Big Data Analytics* pada organisasi.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan arah kebijakan peningkatan kualitas kinerja Satker ke depan.

Tarakan, 28 Februari 2025

**Pengelola Manajemen Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara**